
PEMETAAN SOSIAL DAN PARTISIPASI *STAKEHOLDER* DALAM PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KOMUNITAS DI DESA MAPILA KECAMATAN KABAENA UTARA KABUPATEN BOMBANA

Muhammad Aldin^{1*}, Iskandar Zainuddin Rela², Budiyanto¹

¹ Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

² Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

* **Corresponding Author:** ajurnlmuhammad031@gmail.com

To cite this article:

Aldin, M., Rela., I. Z., & Budiyanto, B. (2024). Pemetaan Sosial dan Partisipasi *Stakeholder* dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekonomi Komunitas di Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana. *JIPPM (Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat)*, 4(3), 301 – 310.
<http://dx.doi.org/10.56189/jippm.v4i3.19>

Received: 14 Juli 2024; **Accepted:** 05 September 2024; **Published:** 30 September 2024

ABSTRACT

This study aims to conduct socio-economic mapping of the community in Mapila Village, North Kabaena Sub-district, taking into account stakeholder perceptions as a basis for community economic development planning. The study used a qualitative descriptive method focusing on socio-economic conditions and stakeholders' perceptions, using Rapid Rural Appraisal (RRA) techniques, household surveys, Focus Group Discussions (FGDs), and semi-structured interviews. The research findings reveal important insights into the community's socio-economic conditions, stakeholder perceptions, and proposed development programmes, and emphasise the importance of collaboration between the government, private sector, and community in creating effective and sustainable development strategies. The research highlights the need to improve education facilities, health services, infrastructure and economic empowerment programmes to support sustainable development in Mapila Village.

Keywords: *Socio-Economic Mapping, Stakeholder Participation.*

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi komunitas merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dan kolaboratif dari berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Lumpkin & Bacq, (2019) berpendapat bahwa perubahan sosial yang positif difasilitasi oleh kolaborasi anggota masyarakat, pendukung, dan agen wirausaha dalam mengumpulkan sumber daya dan mengembangkan kapasitas baru. Peran pemerintah dalam pengembangan masyarakat disoroti oleh Megahwati & Priadana, (2023), yang menekankan aspek fasilitasi dari intervensi pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan. Hal ini termasuk menyediakan barang dan jasa penting untuk mendukung kegiatan masyarakat dan mengoptimalkan pembangunan daerah, selaras dengan pernyataan pengguna tentang peran penting pemerintah dalam kemajuan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didefinisikan sebagai lembaga independen, sukarela, dan nirlaba yang didukung oleh masyarakat (A'yun, 2023). Definisi ini sejalan dengan peran LSM sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, mengadvokasi kebutuhan masyarakat dan memastikan keterwakilan mereka dalam proses

pengambilan keputusan. Tabot *et al* (2020) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam desain dan implementasi proyek, sejalan dengan pendapat bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan inisiatif pembangunan.

Pemetaan sosial-ekonomi adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai profil masyarakat, isu-isu sosial, kebutuhan, dan sumber daya potensial. Pemetaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial-ekonomi di suatu wilayah (Esterhuysen *et al.*, 2017; Hong *et al.*, 2016). Peta-Peta ini sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, potensi sumber daya, dan area yang membutuhkan pengembangan dan perbaikan (Ibanga & Idehen, 2020). Peta sosial-ekonomi merupakan sumber informasi berharga yang berisi data penting tentang populasi, membantu perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan proses pengambilan keputusan (Schuurman *et al.*, 2020; Persello & Kuffer, 2020).

Persepsi stakeholder memainkan peran penting dalam menentukan kebutuhan, prioritas, dan strategi yang harus diambil untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi komunitas. Persepsi ini mencerminkan pandangan, pengalaman, dan harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, yang dapat sangat bervariasi tergantung pada posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi. Usadolo & Caldwell, (2016) menekankan bahwa Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sering kali dipandang sebagai aspek fundamental dari praktik demokrasi. Komunikasi yang transparan dan informatif dengan pemangku kepentingan masyarakat setempat telah terbukti meningkatkan persepsi keadilan dalam proses dan hasil pengambilan keputusan, serta bagaimana pemangku kepentingan diperlakukan (Maddaloni & Derakhshan, 2023).

Kecamatan Kabaena Utara merupakan bagian dari Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini mencakup area seluas sekitar 286,79 km² dan terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Mapila, Wumbulasa, Larolanu, Tedubara, Eemokolo dan Sangia Makmur. Jumlah penduduk di Kecamatan Kabaena Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.075 jiwa dan meningkat menjadi 2.108 jiwa pada tahun 2022. Penduduk di wilayah ini terdiri dari berbagai suku, termasuk suku moronene yang merupakan suku asli Pulau Kabaena, serta migran dari suku makassar, selayar, buton dan bajo. Sebagai bagian dari wilayah kepulauan, Kabaena Utara menghadapi berbagai tantangan yang mencakup keterbatasan aksesibilitas, sumber daya yang terbatas, serta dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah ini sangat penting untuk merancang program pengembangan komunitas yang efektif dan berkelanjutan.

Upaya pengembangan komunitas di Desa Mapila sering kali terhambat oleh kurangnya data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, persepsi stakeholder terhadap kondisi ini dan bagaimana mereka menilai kebutuhan serta solusi yang diperlukan seringkali belum tersampaikan dengan baik. Tanpa pemahaman yang jelas dan data yang valid, kebijakan dan program yang diterapkan mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Mapila dengan mempertimbangkan persepsi stakeholder sebagai dasar untuk pengembangan ekonomi komunitas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pandangan dan harapan para pemangku kepentingan. Informasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi pengembangan ekonomi komunitas yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman pengalaman, perspektif, dan pemikiran partisipan untuk mengungkap makna, tujuan, atau realitas (Mutsigiri, 2022). Fokus penelitian adalah pada kondisi sosial ekonomi dan persepsi para stakeholder. Pengumpulan data tidak sepenuhnya dipandu oleh teori, tetapi lebih pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui pendekatan induktif. Penelitian induktif sering dikaitkan dengan metode kualitatif dan digunakan untuk membangun teori, memahami fenomena, dan menghasilkan hipotesis berdasarkan bukti empiris (Chakraborty & Kar, 2021; Hemmler *et al.*, 2022). Teknik Rapid Rural Appraisal (RRA) digunakan untuk mengumpulkan data secara cepat dan efisien, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial-ekonomi dan persepsi pemangku kepentingan di Desa Mapila. Pendekatan ini dipilih karena keefektifannya dalam melibatkan masyarakat lokal dan memperoleh informasi yang akurat melalui survei rumah tangga, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan wawancara semi-terstruktur. Hasil dari penerapan RRA memberikan wawasan kritis

tentang kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan intervensi untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.. Sementara itu, peserta FGD melibatkan masyarakat, Kepala Desa, dan aparat desa, Ketua BPD Desa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan Tenaga Kesehatan Desa. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi dan klasifikasi data, untuk menyaring data mentah dan memilih yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dipilah berdasarkan tema dan isu yang ditemukan, disajikan berdasarkan tema, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat di Wilayah Penelitian

Kondisi masyarakat merupakan keadaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah melalui proses sosial. Penjelasan lebih lanjut tentang kondisi masyarakat di wilayah penelitian dapat dilihat sebagai berikut.

Perekonomian dan Mata Pencaharian

Wilayah Kabaena Utara sebagian besar dikelilingi oleh lautan, yang membuat masyarakat, khususnya di Desa Mapila berprofesi sebagai nelayan dan bertani sebagai sumber mata pencaharian utama. Profesi ini dapat dijumpai di wilayah Mapila Hole dan Mapila Tanjung. Selain berprofesi sebagai nelayan dan petani, sebagian penduduk di Desa Mapila juga memelihara ternak besar, khususnya sapi, kambing, dan unggas. Selain itu, rencana masuknya perusahaan industri pengolahan biji nikel PT. Bukit Makmur Resources (BMR) serta beberapa perusahaan tambang nikel dan cromit seperti PT. Cromindo Lestari Nusantara, PT. Tiga Mas Nusantara, PT. Cahaya Saga Utama, KSU Padarontole, PT. Manyoi Mandiri dan PT. Pasific Ore Resources yang menyebabkan sebagian masyarakat di Kabaena Utara khususnya warga di Desa Mapila beralih profesi menjadi karyawan tambang dan industri. Mata pencaharian lainnya seperti pegawai negeri (guru, perawat, pegawai kantor).

Kelembagaan dan Politik

Lembaga yang dominan dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di sebagian besar desa di Desa Mapila adalah aparat pemerintah kecamatan dan desa. Namun, kepemimpinan para "orang tua" dari masing-masing suku (Moronene, Bajo, Bugis, Buton, Jawa dan Suku Bali) tetap memainkan peran penting, terutama dalam pelaksanaan ritual adat masing-masing. Mereka juga berfungsi sebagai tokoh yang dihormati yang memberikan saran dan masukan terkait potensi serta permasalahan di Desa. Selain kelembagaan pemerintah dan adat, peran para *patron* juga sangat signifikan, terutama dalam penyebaran informasi pasar dan perkembangan terbaru yang berkaitan dengan interaksi ekonomi masyarakat di luar Kabaena Utara. Peran *patron* sangat penting karena dalam situasi di mana masyarakat membutuhkan bantuan finansial, *patron* menjadi satu-satunya sumber bantuan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktersediaan lembaga keuangan seperti *bank* di Sikeli dan koperasi simpan pinjam yang menawarkan kredit dengan bunga rendah. Lembaga formal lainnya seperti kelompok pemuda, wanita, dan kelompok tani juga ada, namun mereka tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan sehari-hari masyarakat di Kabaena Utara.

Partai politik di Desa Mapila umumnya hanya aktif pada waktu-waktu tertentu menjelang pilkada yang diadakan di Sulawesi Tenggara. Aktivitas mereka meningkat saat pemilihan anggota legislatif, Bupati, atau Gubernur. Karena aksesibilitas yang masih sulit dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten maupun Provinsi, pengaruh politik di wilayah ini tetap lemah. Dominasi klan keluarga tertentu dari suku Moronene, Bugis, dan Buton lebih terasa dibandingkan dengan pengaruh partai politik formal di Desa Mapila.

Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Letak Kabaena Utara yang berada di kepulauan menyebabkan jangkauan dan perhatian pemerintah terbatas, sehingga infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah ini minim. Hingga kini, fasilitas listrik dari PLN, jalan, jaringan telekomunikasi, dan air bersih masih belum optimal di Kabaena Utara. Sebagian besar masyarakat harus berupaya secara mandiri untuk mendapatkan pelayanan dasar. Misalnya, listrik dari PLN hanya tersedia selama 12 jam, dari pukul 07.00 pagi hingga 19.00 malam.

Air bersih yang diperoleh masyarakat hanya berasal dari sumber mata air gunung. Aktivitas pertambangan yang beroperasi di hampir setiap gunung di Kabaena Utara berpotensi mengancam sumber mata air bersih tersebut. Di Desa Mapila, khususnya di Mapila Hole dan Mapila Tanjung, masyarakat harus membeli air bersih dari agen dengan harga rp. 5.000/10 liter air untuk keperluan MCK, serta rp. 5.000/5 liter untuk air minum.

Jaringan telekomunikasi juga terbatas, hanya tersedia di beberapa titik seperti Pelabuhan Pising dan Mapila Hole. Kurangnya perhatian pemerintah membuat fasilitas dasar yang dinikmati di wilayah lain Sulawesi Tenggara belum tersedia di Desa Mapila. Ada puskesmas di Desa Tedubara, namun petugas, sarana pendukung, dan obat-obatan sangat terbatas. Untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih baik, masyarakat harus ke rumah sakit di Ibukota Kabupaten yang jaraknya kurang lebih 2-3 jam dengan kapal fiber dan kapal ferry yang hanya tersedia pada hari Rabu, Sabtu, dan Minggu di Pelabuhan Pising.

Fasilitas pendidikan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya ada di Desa Wumbulasa dan Desa Tedubara, sementara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian hanya ada di Desa Tedubara. Kurangnya fasilitas pendidikan ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat di Desa Mapila tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Akses jalan di Pulau Kabaena juga masih sangat minim, hanya berupa jalan tanah. Transportasi menuju Ibukota Kabupaten atau wilayah lain di luar Pulau Kabaena hanya menggunakan transportasi laut. Hal ini menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat Mapila.

Partisipasi Stakeholder di Desa Mapila

Pada kegiatan FGD terkait isu sosial dan usulan program pengembangan ekonomi komunitas di Desa Mapila, stakeholder desa seperti tokoh pendidikan, bidan pembantu, kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat, dan ketua BPD Desa Mapila memberikan berbagai pendapat dan usulan. Berikut adalah berbagai isu dan usulan program dari *stakeholder* tersebut.

Tabel 1. Temuan Isu Sosial ekonomi dan Usulan Program Pengembangan Ekonomi Komunitas di Desa Mapila

No.	Stakeholder Desa	Opini	Sumber Data
1	Laki-Laki, Kepala Sekolah, 65 Tahun	<i>"Perlu adanya penambahan gedung belajar dan perumahan guru di SDN 112 Mapila dan sekolah-sekolah lainnya". "Nelayan kami masih menangkap ikan secara tradisional, bagusnya kalau ada bantuan alat tangkap ikan yang sedikit modern dengan pelatihannya untuk petani supaya mereka bisa pakai"</i>	FGD
2.	Perempuan, Guru SD, 45 Tahun	<i>"Kami mengharapkan ada pemberian laptop/komputer untuk guru dan siswa serta mengajarkan IT di sekolah, membangun laboratorium komputer dan IPA di SMP 18 Kabaena Utara, serta menyediakan atribut dan fasilitas TK seperti pagar dan menambah guru TK".</i>	Wawancara
3.	Perempuan, Bidan Pembantu, 35 Tahun	<i>"Kita itu sangat butuhkan seperti alat persalinan, oksigen, dan Obat-obatan. Dengan bantuan tenaga kesehatan".</i>	Wawancara
4.	Laki-Laki, Kepala Desa, 42 Tahun	<i>"Kami butuhkan kapal ambulance karena ada beberapa kasus masyarakat kami itu sakit dan harus di rujuk kerumah sakit kabupaten atau provinsi, tapi tidak ada kapal untuk menyeberang".</i>	FGD
5.	Laki-Laki, Tokoh Masyarakat, 55 Tahun	<i>"Kalau bisa kami dibantu uang untuk biaya hidup, seperti orang-orang tua kami yang sudah tidak bisa kerja lagi karena faktor umur".</i>	FGD
6.	Laki-Laki, Sekretaris Desa, 37 Tahun	<i>"Masyarakat kami mayoritas bekerja sebagai nelayan, pembangunan dermaga dengan pengadaan perahu fiber sangat membantu kami khususnya para nelayan".</i>	FGD
7.	Laki-Laki, Ketua BPD Desa, 43 Tahun	<i>"Di Desa kami ada pantai pising, supaya ada yang datang disitu baiknya diadakan fasilitas seperti kamar mandi, ruang terbuka hijau mushollahnya dengan gazebo atau warung tempatnya masyarakat untuk menjual". "Modal untuk masyarakat kami khususnya nelayan, petani dan peternak sangat dibutuhkan. Kalau untuk nelayan itu alat tangkapnya mereka, kalau petani itu seperti pupuk, bibit dengan traktornya sama kalau untuk peternak baiknya ada bantuan pengadaan kandang untuk sapi".</i>	FGD
8.	Laki-Laki, Tokoh Masyarakat, 47 Tahun	<i>"Air besih di Desa kami masih sulit di akses apalagi kalau banjir, harapan kami ada pengadaan sumur bor dengan bak untuk penampungan air untuk atasi kalau air tidak mengalir"</i>	Wawancara

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Berdasarkan hasil penelitian dengan berbagai *stakeholder* di Desa Mapila, maka dirumuskan tema berdasarkan temuan isu/usulan program di Desa Mapila sebagai berikut:

Tabel 2. Tema, Temuan Isu Sosial ekonomi dan Usulan Program Pengembangan Ekonomi Komunitas di Desa Mapila.

No.	Tema	Temuan Isu Sosial Ekonomi dan Usulan Program
1.	Pendidikan dan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan gedung belajar dan perumahan guru di SDN 112 Mapila dan sekolah-sekolah lainnya (Tokoh Pendidikan) • Pengadaan laptop/komputer untuk guru dan siswa serta pembelajaran IT di sekolah (Tokoh Pendidikan) • Pembangunan Laboratorium komputer dan IPA di SMP 18 Kabaena Utara (Tokoh Pendidikan) . • Pengadaan atribut dan sarana prasarana TK, termasuk pagar dan penambahan pengajar TK (Tokoh Pendidikan).
2.	Kesehatan dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan mobil ambulance dan kapal/ambulance laut untuk Desa (Bidan Pembantu), Kepala Desa Mapila. • Bantuan Alat Persalinan, Oksigen, dan Obat-obatan untuk masyarakat (Bidan Pembantu). • Perawatan Kesehatan Menyeluruh dan Peningkatan Perawatan oleh Perawat di desa (Bidan Pembantu). • Bantuan Sosial/Kompenasasi untuk masyarakat yang terkena dampak aktivitas perusahaan (Tokoh Pendidikan). • Bantuan Sosial Langsung (BLT) untuk masyarakat yang membutuhkan (Tokoh Masyarakat) Dusun Malandahi
3.	Infrastruktur dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dermaga untuk nelayan dan pengadaan perahu fiber (Sekdes Mapila). • Pengadaan sumur bor dan bak air bersih dan (Tokoh Masyarakat). • Penyediaan ruang terbuka hijau (Ketua BPD Desa Mapila). • Fasilitas Wisata Pantai berupa MCK, ruang ganti pakaian, mushollah, dan warung di Dusun Pising (Ketua BPD Desa Mapila).
4.	Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pengadaan peralatan tangkap modern untuk nelayan (Kepala Desa Mapila). • Bantuan sarana penunjang dan modal untuk nelayan, petani dan peternak (Ketua BPD Desa Mapila).

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Pendidikan dan Keterampilan

Berdasarkan hasil penelitian, menyoroti upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mendukung pengembangan ekonomi komunitas. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi penambahan gedung belajar dan perumahan guru, serta pengadaan laptop dan komputer untuk guru dan siswa guna meningkatkan literasi digital. Pembangunan laboratorium komputer dan IPA yang bertujuan meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pengadaan atribut dan sarana prasarana serta penambahan pengajar di TK ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan anak. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pendidikan sebagai fondasi bagi pengembangan ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian oleh Frameiliada *et.al.*, (2023) menekankan bahwa fasilitas belajar seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran memainkan peran penting dalam mendukung proses pembelajaran. Selain itu, penelitian oleh Kibona *et.al.*, (2023) kecukupan fasilitas sekolah secara signifikan memengaruhi kinerja akademik siswa di sekolah menengah umum di Wilayah Unguja kepulauan zanzibar negara Tanzania.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan

menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas yang baik membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dijelaskan, untuk mendukung pengembangan ekonomi komunitas, penting untuk memperbaiki dan menambah fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah dan rumah guru, serta menyediakan komputer untuk meningkatkan keterampilan digital. Pembangunan laboratorium membantu siswa belajar ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan, serta perlu evaluasi rutin untuk memastikan semua upaya berjalan dengan baik.

Kesehatan dan Kesejahteraan

Hasil penelitian di Desa Mapila menunjukkan pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif. Pengadaan mobil ambulance dan kapal/ambulance laut akan mempercepat penanganan darurat medis. Penyediaan alat persalinan, oksigen, dan obat-obatan memastikan ibu hamil dan masyarakat mendapatkan perawatan yang memadai. Perawatan kesehatan menyeluruh oleh bidan dan peningkatan kualitas perawatan oleh perawat desa juga sangat penting. Selain itu, bantuan sosial dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak aktivitas perusahaan, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga yang membutuhkan, memperlihatkan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi di Desa Mapila. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

Temuan *World Health Organization* (WHO) yang dikutip oleh Obubu *et.al.*, (2023) menekankan pentingnya infrastruktur kesehatan yang berkelanjutan dan tahan lama untuk mendukung penyediaan layanan yang berkualitas. Selain itu, Program-program bantuan langsung tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat, terutama mereka yang terkena dampak industri lokal. Penelitian menunjukkan bahwa program BLT, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menstimulasi kegiatan ekonomi di dalam masyarakat (Hariyanto *et.al.*, 2022; Midyanti *et.al.*, 2023; Reptiana *et.al.*, 2022). Program-program ini dirancang untuk memberikan bantuan keuangan kepada kelompok-kelompok rentan, memastikan keamanan pendapatan dan akses terhadap layanan-layanan dasar. Berbagai temuan dan penelitian yang telah dilakukan dapat mendukung temuan di Desa Mapila, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan ekonomi. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk hidup produktif, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menekankan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukannya sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kompensasi untuk masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022) tentang Cipta Kerja menekankan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pembahasan tentang pentingnya layanan kesehatan dan kesejahteraan di Desa Mapila serta berbagai temuan dan regulasi yang mendukung, disarankan agar pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terus memperkuat kolaborasi dalam menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai dan program bantuan sosial. Pengadaan mobil ambulance dan kapal laut untuk penanganan medis darurat, serta penyediaan alat persalinan dan obat-obatan, harus menjadi prioritas. Selain itu, program BLT perlu terus dioptimalkan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi warga, terutama yang terdampak aktivitas perusahaan. Penting juga untuk memastikan kualitas perawatan oleh bidan dan perawat desa dengan pelatihan berkelanjutan. Pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak akan menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan sejahtera bagi masyarakat.

Infrastruktur dan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dan lingkungan di Desa Mapila memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi komunitas. Pembangunan dermaga dan pengadaan perahu fiber meningkatkan produktivitas perikanan, sementara pengadaan sumur bor dan bak air bersih memenuhi kebutuhan dasar warga. Penyediaan ruang terbuka hijau serta fasilitas wisata pantai seperti MCK, ruang ganti pakaian, mushollah, dan

warung, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup dan daya tarik wisata lokal tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, infrastruktur ini mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui sektor perikanan, kebutuhan dasar, dan pariwisata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Astawa *et.al.*, (2019) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata telah terbukti meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan citra desa, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan meningkatkan pendanaan desa. Studi mengenai pentingnya infrastruktur penunjang untuk nelayan melakukan aktivitas ditunjukkan oleh Mulyani *et.al.*, (2024) menekankan bahwa keberhasilan tangkapan dan efisiensi upaya nelayan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakteristik kapal, alat tangkap, dan kondisi lingkungan perairan. Selain itu, berkaitan dengan aspek lingkungan, berbagai penelitian juga menekankan bahwa dengan adanya ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, interaksi sosial, dan keterlibatan masyarakat (Sazali *et.al.*, 2022; Vaznoniene & Vaznonis, 2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 mendefinisikan fasilitas pariwisata adalah semua jenis yang mencakup secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Selain itu, undang-undang ini juga mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan agar pemerintah Desa Mapila dan pemangku kepentingan setempat terus mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor perikanan, kebutuhan dasar, dan pariwisata untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi komunitas. Selain itu, juga disarankan merekomendasikan penerapan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pengadaan peralatan tangkap modern untuk nelayan di Desa Mapila telah meningkatkan efektivitas dan hasil tangkapan, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, bantuan sarana penunjang dan modal bagi nelayan, petani, dan peternak telah memberikan dorongan signifikan terhadap produktivitas sektor-sektor ini, membantu mereka dalam mengoptimalkan hasil usaha dan meningkatkan stabilitas ekonomi komunitas. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan komunitas melalui akses terhadap pelatihan dan sumber daya, yang tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi tetapi juga meningkatkan keterlibatan sosial dan rasa kebersamaan di antara warga desa. Kombinasi dukungan ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan, peralatan, dan modal sangat penting untuk memperkuat ekonomi lokal, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat struktur sosial di Desa Mapila.

Temuan dari hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Virianita *et.al.*, (2020) di Dusun Watupecah Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan kelompok memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi bisnis rumah tangga nelayan. Selain itu, studi oleh Xia & Li, (2024) menekankan bahwa memperkuat pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting untuk menerapkan strategi guna memastikan ketahanan pangan, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan iklim. Lebih lanjut, Rohman *et.al.*, (2023) berpendapat bahwa dengan mentransfer modal sosial dan memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, upaya pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi landasan utama dalam upaya pemberdayaan petani di Indonesia. UU ini mendefinisikan bahwa pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Selain itu, terdapat tujuan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk menyediakan parasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menguatkan

kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, serta menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha. Kebijakan ini berupaya memberdayakan petani dan nelayan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, akses teknologi, penguatan kelembagaan, dan penyediaan sarana usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka.

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan agar *stakeholder* yang terlibat terus berinvestasi dalam pelatihan, peralatan tangkap modern, dan bantuan sarana penunjang bagi nelayan, petani, dan peternak. Program pendidikan dan pendampingan harus ditingkatkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial komunitas. Selain itu, pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan perlu diperkuat untuk memastikan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Nelayan harus terus didorong untuk menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Pengembangan ekonomi komunitas di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, sangat bergantung pada pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta persepsi para pemangku kepentingan. Melalui pemetaan sosial-ekonomi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, ditemukan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan dan melaksanakan program-program yang efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pengembangan untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan komunitas secara menyeluruh.

REFERENSI

- A'yun, A. Q. (2023). Repositioning Environmental NGOs: Either as non-Governmental or Private Sector Organizations. *Journal of Social Development Studies*, 4(2), 257–266. <https://doi.org/10.22146/jdsds.6822>
- Astawa, I. P. M., Wahyuni, L. M., Srisuwan, N., & Rachsiriwatcharabul, N. (2019). Socio-Economic Impact of Developing Tourism Villages in Bali. *Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (ICASTSS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.2>
- Chakraborty, A., & Kar, A. K. (2021). How did COVID-19 impact working professionals – a typology of impacts focused on education sector. *The International Journal of Information and Learning Technology*, 38(3), 273–282. <https://doi.org/10.1108/IJILT-06-2020-0125>
- Esterhuysen, S., Sokolic, F., Redelinghuys, N., Avenant, M., Kijko, A., Glazewski, J., Plit, L., Kemp, M., Smit, A., Vos, A. T., & von Maltitz, M. J. (2017). Vulnerability mapping as a tool to manage the environmental impacts of oil and gas extraction. *Royal Society Open Science*, 4(11), 171044. <https://doi.org/10.1098/rsos.171044>
- Frameiliada, D., Setiawan, S., Azizah, T., & Margarida, K. (2023). Learning Facilities in Supporting the Process Learning and Learning Motivation. *Sciencetechno: Journal of Science and Technology*, 2(2), 118–124. <https://doi.org/10.55849/sciencetechno.v2i2.162>
- Hariyanto, W., Komalawati, K., Romdon, A. S., Oelviani, R., Basuki, S., & Utomo, B. (2022). Jogo Tonggo: Utilising Local Wisdom as a Resilient Strategy During COVID-19 Pandemic in Central Java Indonesia. *Journal of Resilient Economies (ISSN: 2653-1917)*, 2(1). <https://doi.org/10.25120/jre.2.1.2022.3921>
- Hemmler, V. L., Kenney, A. W., Langley, S. D., Callahan, C. M., Gubbins, E. J., & Holder, S. (2022). Beyond a coefficient: an interactive process for achieving inter-rater consistency in qualitative coding. *Qualitative Research*, 22(2), 194–219. <https://doi.org/10.1177/1468794120976072>
- Hong, L., Frias-Martinez, E., & Frias-Martinez, V. (2016). Topic Models to Infer Socio-Economic Maps. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 30(1). <https://doi.org/10.1609/aaai.v30i1.9892>
- Kibona, A. J., Muteti, C., & Salema, V. (2023). Effects of School Learning Facilities on Students' Academic

- Performance of Form Four National Examinations in Public Secondary Schools in Unguja, Zanzibar, Tanzania. *International Journal of Education Humanities and Social Science*, 06(05), 162–173. <https://doi.org/10.54922/IJEHSS.2023.0584>
- Lumpkin, G. T., & Bacq, S. (2019). Civic Wealth Creation: A New View of Stakeholder Engagement and Societal Impact. *Academy of Management Perspectives*, 33(4), 383–404. <https://doi.org/10.5465/amp.2017.0060>
- Maddaloni, F. DI, & Derakhshan, R. (2023). Stakeholders' perception of organization: an attribution and fairness perspective. *International Journal of Managing Projects in Business*. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-08-2023-0178>
- Megahwati, I., & Priadana, S. (2023). The Realization of the Government's Role in Creating Food Security in Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 847. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1101>
- Midyanti, D. M., Bahri, S., Suhardi, S., & Midyanti, H. I. (2023). Eligibility of village fund direct cash assistance recipients using artificial neural network. *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)*, 12(4), 1611. <https://doi.org/10.11591/ijai.v12.i4.pp1611-1618>
- Mulyani, N., Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Kamaruddin, C. A. (2024). Determinants of Catch And Catch Per Unit Effort Of Motorboat And Outboard Motorboat Fishers In Bulukumba Regency. *Demeter: Journal of Farming and Agriculture*, 2(1), 111–119. <https://doi.org/10.58905/demeter.v2i1.229>
- Mutsigiri, A. (2022). Impact of humanitarian aid on food security in rural communities in zimbabwe: the case of ward 14 and 15 of buhera district. *Gujarat Journal of Extension Education*, 33(2), 51–58. <https://doi.org/10.56572/gjoee.2022.33.2.0010>
- Obubu, M., Chuku, N., Ananaba, A., Diallo, R., Sambo, E., Kolade, O., Oyekanmi, T., Olaosebikan, K., & Serrano, O. (2023). Bed space, referral capacity and emergency response of the healthcare facilities in lagos state: a key to improving healthcare. *MOJ Public Health*, 12(1), 67–72. <https://doi.org/10.15406/mojph.2023.12.00412>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. (2022). *Cipta Kerja*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. (2011). *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5183/pp-no-50-tahun-2011>
- Reptiana, R. P., Widianoro, D., Sari, W. D., Desvianti, E., & Arezah, E. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 1(2), 105–110. <https://doi.org/10.25299/jicop.v1i2.8793>
- Rohman, A., Rozikin, M., & Adhitama, M. O. (2023). Empowerment model by Village Owned Enterprises (BUMDes) realizing sustainable village tourism in Malang Regency. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 114–126. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v8i2.8264>
- Sazali, M. F., Ab Dulhamid, H., & Zainol, H. (2022). Elderly's Feedback on The Service Quality of Urban Green Open Space In Penang As A Catalyst for Health and Lifestyle Resilience. *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities*, 4. <https://doi.org/10.17576/ebangi.2022.1904.12>
- Tabot, A., Owuor, O., & Migosi, J. (2020). Influence of Participatory Project Initiation on Sustainable Forest Management in Saboti, Trans-Nzoia County, Kenya. *International Journal of Forestry Research*, 2020, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2020/2648391>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023. (2023). *Kesehatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013. (2013). *Perlindungan dan Pemberdayaan petani*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. (2016). *Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>

